



Buletin Triwulanan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

Dari Redaksi

Selamat Jalan Pak Herman ...



Senin, 20 Juni 2011. Hari masih pagi, jam baru menunjukkan pukul 08.00 WITA, pegawai di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pun sedang memulai kembali aktivitas awal minggu setelah libur akhir pekan. Tiba-tiba seorang teman di ruangan mendapatkan kabar mengejutkan di bbm-nya yang mengabarkan bahwa Wakil Ketua BPK RI, Bapak Herman Widyandana, meninggal dunia pukul 06.30 WIB atau 07.30 WITA. Innalillahi wa inna illaihi roji'un.

Bagi kami, para pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, kabar tersebut sungguh mengejutkan, sebab sedikit pun kami tidak pernah mendengar kabar beliau sakit, setahu kami beliau masih muda, enerjik dan masih sehat wal afiat. Tapi, itulah takdir Tuhan. Kita tidak tahu kapan maut akan menjemput.

Bendera setengah tiang segera kami kibarkan sebagai tanda berkabung. Walaupun kami di Perwakilan tidak pernah melihat sosok almarhum secara langsung, tetapi kami percaya bahwa beliau selalu memperhatikan kami di Perwakilan.

Atas nama keluarga besar BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kami turut berbelasungkawa atas kepergian almarhum. Semoga amal ibadah dan pengabdianya diterima disisi Allah SWT. Amin. Selamat jalan Pak Herman, doa kami menyertaimu.

-redaksi-

Daftar isi

Table with 2 columns: Content Title and Page Number. Includes items like 'Dari Redaksi', 'Tajuk Utama Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2010 Provinsi Sulawesi Tengah Naik Kelas', etc.

Tajuk utama

Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2010 Provinsi Sulteng Naik Kelas



Palu-Eboni, Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Dadang Gunawan (kiri), menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Sulawesi Tengah TA 2010 kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Prof (Em) Drs. H. Aminuddin Ponulele, M. S. (kanan), di gedung DPRD Sulteng, Rabu (1/6).

PALU - Eboni

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Tahun Anggaran (TA) 2010. Hal tersebut berarti Provinsi Sulteng "naik kelas" setelah pada TA 2009 mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat atau disclaimer opinion.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi Sulteng TA 2010 tersebut, disampaikan Kepala Perwakilan Provinsi Sulteng, Dadang Gunawan, kepada Ketua DPRD Provinsi Sulteng, Prof. (Em). Drs. H. Aminuddin Ponulele, M. S., dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Drs. Rais Lamangkona, MT, pada saat sidang paripurna DPRD Provinsi Sulteng di Gedung DPRD Sulteng, Rabu (1/6).

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah

Provinsi Sulteng pada TA 2010 dalam rangka perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Selain itu Kepala Perwakilan juga menyampaikan bahwa LHP atas LKPD Provinsi Sulteng TA 2010 memuat delapan temuan atas kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan sebelas temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terhadap temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI tersebut, Kepala Perwakilan Provinsi Sulteng mengingatkan DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulteng untuk menindaklanjuti dan memberikan penjelasan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima serta segera menyusun rencana aksinya.

Menanggapi opini WDP yang diberikan BPK RI, Ketua DPRD dan Sekda Provinsi Sulteng dalam sambutannya mengaku gembira dan berjanji akan segera mempelajari dan menindaklanjuti LHP BPK RI tersebut. (kur)





## Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2010 Se-Sulteng 10 WDP dan 2 Disclaimer



Palu-Eboni, foto kiri : Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Tojo Una-Una TA 2010 kepada Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Djamal Djuraejo, disaksikan Bupati Tojo Una-Una, Damsyik Ladjalani. foto kanan : Penyerahan LHP LKPD atas LKPD Kabupaten Morowali TA 2010 kepada Bupati Morowali, Drs. Hi. Anwar Hafid.



### PALU - Eboni

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LKPD TA 2010 pada dua belas Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada sepuluh Pemda dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau *disclaimer* kepada dua Pemda.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Sulawesi Tengah, Dadang Gunawan, pada saat menyerahkan LHP BPK RI atas LKPD TA 2010 kepada Ketua/Wakil Ketua DPRD dan Pemda Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, di Aula Kantor Perwakilan, antara tanggal 26 Mei s.d. 24 Juni 2011.

Pemda yang memperoleh opini WDP yaitu Kab. Donggala, Kab. Banggai, Kab. Tolitoli dan Kab. Tojo Una-Una yang diserahkan pada Kamis, (26/5), Kab. Poso, Kab. Banggai Kepulauan dan Kota Palu (27/5), Kab. Morowali (30/5), Provinsi Sulawesi Tengah dan Kab. Sigi (1/6). Sedangkan opini *disclaimer* disandang oleh Kab. Parigi Moutong (31/5) dan Kab. Buol (24/6).

Dibandingkan dengan LHP LKPD TA 2009, tren opini pada LKPD TA 2010 mengalami peningkatan cukup signifikan karena pada TA 2009 hanya empat Pemda yang mendapat opini WDP sedangkan pada TA 2010 sepuluh Pemda. Berarti terdapat enam Pemda yang pada LKPD TA 2010 "naik kelas".

Walaupun tren opini atas LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah TA 2010 meningkat, Kalan dalam setiap sambutan penyerahan LHP atas LKPD TA 2010 selalu mengingatkan bahwa masih banyak pembenahan dan pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Pemda, khususnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Masalah penatausahaan aset Pemda yang dari tahun ke tahun selalu menjadi temuan, merupakan salah satu sorotan. Kalan menghimbau agar Pemda segera membenahi masalah aset secara serius dan jangan menunda-nunda lagi serta segera menyusun rencana aksi yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa masih banyak aset yang belum mempunyai bukti kepemilikan, aset tetap dikuasai pihak lain, aset tetap yang telah dihibahkan, namun tetap disajikan dalam neraca, dan SKPD belum membuat laporan penggunaan barang semesteran dan tahunan sehingga nilai aset tetap yang disajikan tidak dapat diyakini kewajarannya.

Dalam kesempatan tersebut Kalan juga menyampaikan tentang pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemantauan kerugian daerah yang tidak segera diselesaikan dan berlarut-larut. Bahkan terdapat penyelesaian kasus kerugian daerah pada Provinsi Sulawesi Tengah sudah berusia lebih dari 22 tahun. Sedangkan berdasarkan Permendagri No.5 Tahun 1997, Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa penyelesaian dengan cara angsuran diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu dua tahun. Oleh sebab itu Pemda diharapkan untuk sungguh-sungguh melakukan upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, salah satunya dengan mendorong Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) agar menggelar sidang kasus penyelesaian kerugian daerah.

Pada akhir sambutannya, Kalan menghimbau agar Pemda bersama-sama dengan DPRD untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah guna mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. (kur)

### Penyerahan LHP atas Program Stimulus



### PALU - Eboni

Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Dadang Gunawan, menyerahkan LHP atas Program Stimulus Belanja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009 pada SKPD Kegiatan Stimulus Daerah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Donggala dan SKPD Kegiatan Stimulus Daerah Dinas PU Kabupaten Parigi Moutong kepada Bupati Donggala, H. Habir Ponulele (foto kiri) dan Bupati Parigi Moutong, Drs. H. Longki Djanggola, M. Si. (foto kanan), di Aula Kantor Perwakilan, Senin (11/4).

Pemeriksaan atas Program Stimulus merupakan pemeriksaan kinerja yang bersifat tematik dan dilakukan di seluruh Indonesia pada Semester II TA 2010. Pada Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli s.d. 3 Agustus 2010. Penyerahan secara parsial kepada DPRD dan Bupati dilakukan setelah LHP hasil konsolidasian seluruh provinsi dibahas dengan Menteri PU dan diserahkan kepada DPR RI, DPD dan Presiden pada tanggal 31 Maret 2011. (kur)



## Pembahasan Draft MoU E-Audit antara BPK RI dan Pemerintah Daerah Se-Sulteng



PALU - *Eboni*

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah menggelar pembahasan Draft *Memorandum of Understanding (MoU)* atau nota kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara atau disebut dengan *e-audit*, bertempat di Aula Kantor Perwakilan, Selasa (12/4).

Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Dadang Gunawan, dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan dari dilaksanakannya pembahasan yaitu untuk menampung saran atau usulan Pemda terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam draft kesepakatan bersama.

Hasil dari pembahasan nota kesepahaman tersebut kemudian disusun dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum BPK RI untuk dilakukan finalisasi. Rencananya dalam bulan September 2011 akan dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.

E-Audit merupakan suatu metode pemeriksaan yang memanfaatkan sinergi antara sistem informasi internal BPK RI (e-BPK) dengan sistem informasi internal milik entitas pemeriksaan (e-Auditee) yang akan membentuk sebuah komunikasi data secara online antara e-BPK dengan e-Auditee yang secara sistematis membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK. Diharapkan dengan e-audit pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel. (kur)

## Sosialisasi Reformasi Birokrasi pada Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah



PALU - *Eboni*

Biro SDM BPK RI bekerjasama dengan Sub Bagian SDM Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan sosialisasi reformasi birokrasi, rencana strategis BPK RI dan rencana implementasi Renstra 2011-2015 kepada pejabat dan seluruh pegawai Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, di Aula Kantor Perwakilan, Rabu (1/6).

Hadir sebagai pembicara dalam sosialisasi tersebut antara lain Kasubag Penilaian dan Pengembangan Kompetensi pada Biro SDM, *Sulung Setyo Amboro*, Kepala Seksi Renstra dan Manajemen Kinerja III.A pada Direktorat Perencanaan Strategis, *Janter Simanjuntak* dan Manajemen Kinerja dan Kasubag Dukungan Teknologi Informasi pada Biro TI, *Iwan Arief Wijayanto*.



Menurut Sulung, tujuan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPK RI yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar serta kode etik aparatur negara. Sedangkan sasarannya yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Pada akhir acara, Sulung menyerahkan Kerangka Kerja Rencana Strategis dan RIR 2011-2015 kepada Kalan. (kur)





inna lillahi wa inna illaihi roj'un  
Keluarga Besar  
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

mengucapkan  
Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya

**Wakil Ketua BPK RI**  
**Dr. Ir. Herman Widyananda, S.E., M.Si.**  
(28 Mei 1960 - 20 Juni 2011)  
dalam usia 51 tahun

Semoga Almarhum mendapat tempat sebaik-baiknya  
di sisi Allah SWT dan kepada keluarga yang ditinggalkan  
diberikan kesabaran dan kekuatan lahir dan batin



"Semoga dengan bertambahnya  
umur, bertambah pula kedewasaan  
dalam bertindak dan berfikir.  
Selamat ulang tahun, panjang  
umur, sehat dan sukses terus"

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Suhatman Adjis          | 3 Juli       |
| Yuliade Saputra         | 7 Juli       |
| Sri Kasembadan          | 9 Juli       |
| Yati Nasyrah Paturusi   | 15 Juli      |
| Imran                   | 21 Juli      |
| Arisman Tamaapa         | 22 Juli      |
| Ana Fitri               | 22 Juli      |
| Zulfianti               | 23 Juli      |
| M. Sholichuddin         | 31 Juli      |
| Sigit Istiyanto         | 4 Agustus    |
| Arafiq                  | 5 Agustus    |
| Aditya Bardawansyah     | 7 Agustus    |
| Hary Setiawan           | 25 Agustus   |
| Marsono                 | 26 Agustus   |
| Dhenny Septiady         | 1 September  |
| Suryadi Wawan Kurniawan | 8 September  |
| M. Syazili              | 14 September |
| Kortina Gultom          | 29 September |

Redaksi Eboni mengucapkan



Selamat menempuh hidup baru

**Bonifasius Astrawinata**  
(staf Seksi Sulteng IA)  
dengan  
**Devina Dona Nainggolan**  
(Jakarta, 29 April 2011)

**Eden Muharamsyah**  
(staf Seksi Sulteng IB)  
dengan  
**Maria Natalia Mamesah**  
(Jakarta, 24 April 2011)

**Galih Rakasiwi**  
(staf Sub Bagian SDM)  
dengan  
**Rizkkie Wiryani**  
(Bandung, 18 Juni 2011)

**Toufan Toufig A. N.**  
(staf Sub Bagian Umum)  
dengan  
**Mayacipta Noviafasta P.**  
(staf Seksi Sulteng IIB)  
(Semarang, 29 Juni 2011)

**pisah sambut pegawai**



**Yusuf Efendi Kusuma, S. E., AK**  
**Iwan Santoso, S. E., AK**

Selamat bertugas di tempat yang baru  
Perwakilan Provinsi Jawa Timur



**Yonnas Pancasila Sakti, A. Md.**  
**Zebri Sukardi Sitohang, A. Md.**

Selamat bergabung menjadi keluarga besar  
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah



K  
E  
L  
A  
T  
#  
M  
A  
S  
R  
A  
N

**"Maulana Iqbal Lazuardi"**  
Cilacap, 7 Juni 2011

putra pertama dari  
**Rony Setyo Kurniawan**  
(staf Sub Bagian Hukum Humas)  
dan  
**Lintang Esti Ayuningtyas**

**Eboni** Penanggungjawab Ruslan Redaktur Agus (agt) Penyunting/Editor Rony Setyo (kur) Redaktur Pelaksana Wawan (wwn) Desain Grafis dan Fotografer Hendy Ramadani (hen), Ronny Yohanes M (mas) dan Rony Setyo Kurniawan (kur) Sekretariat Aditya Bardawansyah (bar)

Alamat Redaksi Sub Bagian Hukum dan Humas Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI, Jln. Prof. Moh. Yamin No.35 Palu, Sulawesi Tengah 94121; Telp. (0451) 486622 Ext. 118; Fax (0451) 486633; e-mail : [hukumhumas.sulteng@yahoo.com](mailto:hukumhumas.sulteng@yahoo.com)

Redaksi menerima kiriman berita, artikel atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan ke-BPK-an lainnya. Bagi tulisan yang dimuat akan mendapatkan souvenir cantik. Untuk kritik, saran dan segala uneg-uneg tentang permasalahan pada Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, silakan email atau sampaikan ke redaksi Eboni.